



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



KAMIS PON

1 FEBRUARI 2024 (20 REJEB 1957 / TAHUN LXXIX NO 124)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

SIAP LAPOR KE PRESIDEN Mahfud MD Mundur dari Kabinet

JAKARTA (KR) - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akhirnya menyatakan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju (KIM). Surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam itu akan diserahkan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," kata Mahfud di Lampung, Rabu (31/1).

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring, Mahfud mengatakan, surat pengunduran dirinya akan ia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan, Kamis (1/2).

"Surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal bertemu dengan Presiden. Saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan," ujar Mahfud.

Ia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh parpol yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud. Sebelumnya, keinginan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Selasa malam (23/1). Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. "Menunggu timing dan dengan rasa hormat kepada Presiden, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," ucap Mahfud.

* Bersambung hal 7 kol 1



Mahfud MD menyatakan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam.

Analisis 'Kementhus' Heri Priyatmoko MA

KAKEK moyang Jawa mewariskan segudang terminologi dan aforisma yang bisa dirujuk untuk *kaca benggalah* oleh masyarakat kontemporer. Ambillah misal, belakangan di jagad maya bersiweran istilah lawas bermuansa negatif dan menyangkut etika, yaitu *kementhus*, *kemlinthi*, dan *kemaki*. Lewat pustaka *Bausastra Jawa* (1939), pekamus Poerwadarminta membubuhkan lema *kementhus* yang mengandung makna sok pinter dan berlagak berani.

Puluhan tahun sebelumnya, pujangga kenamaan Padmasusastra dalam naskah *Tembang Becik* (1898) telah memberi imbuhan: *kementhus ora pecus*. Penyangatan atas diksi itu membungkus arti bahwa orang yang dipenuhi lagak dan jauh dari tatakrama, juga sejatinya tidak mampu dalam penguasaan pengetahuan ataupun merampungkan pekerjaan. Sudah songong, ditambah bodoh, ujar orang Jakarta.

Lema *kementhus* acap kita jumpai untuk melukiskan sosok pemuda ketimbang golongan tua. Maka, dalam obrolan di angringan, gang kampung, ataupun pawon yang akrab dengan dunia *rasan-rasan*, tak jarang lubang kuping mendengar kalimat: *bocah kementhus*. Memori kolektif wong Jawa sangat erat dengan piwulang yang terpantul dari kisah pewayangan. Dari mulut sang dalang,

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:55	15:14	18:08	19:21	04:19

Kamis, 1 Februari 2024
Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

GELEDAH SEJUMLAH TEMPAT DI SIDOARJO KPK Amankan Uang, Mobil dan Dokumen

JAKARTA (KR) - Penggeledahan dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah titik di Sidoarjo. Hasilnya, mengamankan sejumlah uang, dokumen, hingga mobil dalam penggeledahan terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya menyatakan, pada Selasa (30/1), tim penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. "Sedang lokasi dimaksud di antaranya adalah Pendapa Delta Wibawa, Kantor BPPD, dan rumah kediaman pihak terkait lainnya," jelasnya di Jakarta, Rabu (31/1).

Tim penyidik KPK, lanjutnya, dalam penggeledahan mengamankan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing. Namun demikian, Ali, tidak membeberkan nominal uang yang disita. Selain itu yang diamankan tiga unit mobil juga disita dari penggeledahan tersebut. "Yang turut diamankan juga sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat," tuturnya.

Untuk yang berkaitan dengan dokumen yang disita, menurut Ali, adalah dokumen yang diduga berkaitan dengan pemotongan dana insentif. "Jadi, dari kegiatan ini,

* Bersambung hal 7 kol 5

'Petisi Bulaksumur' Ingatkan Jokowi Mestinya Berpegang pada Jati Diri UGM

YOGYA (KR) - Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan 'Petisi Bulaksumur' yang dibacakan Prof Dr Koentjoro (mewakili sivitas) di Balairung UGM Yogyakarta, Rabu (31/1).

Petisi tersebut dilatarbelakangi keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

Saat membacakan petisi tersebut, Prof Koentjoro mengatakan, Sivitas Akademika UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM.

Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi yang menyimpang yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan



Sivitas Akademika UGM membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. "Presiden Jokowi sebagai alumni UGM, mestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokrati-

sasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (*legitimate*) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana teruang di dalam pembu-

kaan UUD 1945," kata Prof Koentjoro. Presiden Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni UGM. Alih-alih mengamatkan dharma bhakti almaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan

nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

* Bersambung hal 7 kol 5

GUGATAN PRAPERADILAN EDDY HIARIEJ DITERIMA KPK Anggap Sebagai Koreksi Formil

JAKARTA (KR) - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Dengan demikian, penetapan tersangka



Eddy OS Hiariej

terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengelolaan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM. Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Menanggapi putusan tersebut, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan

* Bersambung hal 7 kol 4

AJUKAN GUGATAN KE PTUN Anwar Usman Minta Jadi Ketua MK Lagi

JAKARTA (KR) - Hakim konstitusi sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu (31/1).

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai Ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan pengugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

* Bersambung hal 7 kol 1

PUNCAK HARLAH KE-101 NU UNU Disiapkan Menjadi Luar Biasa

Listyo Sigit Prabowo. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menceritakan awal mulanya pembangunan gedung tersebut. Pada Januari 2020, Pre-

siden Jokowi menerima surat permohonan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY dan PBNU agar pemerintah membantu membangun

Kampus UNU Yogyakarta. "Alasannya, organisasi lain sudah punya kampus bagus-bagus," ucap Presiden Jokowi mengutip pernyataan delegasi NU kala

itu. Selain itu, PBNU melaporkan belum memiliki universitas yang bagus,

* Bersambung hal 7 kol 1



Presiden Jokowi bersama jajaran PBNU serta Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Al Mazrouei pada puncak resepsi Harlah ke-101 Nahdlatul Ulama.



● SEJAK sebulan lalu, halaman rumah saya dipinjam untuk memasang alat peraga kampanye Pemilu 2024 dari sejumlah parpol dan tiga pasangan capres-cawapres. Di bawahnya, saya tanami beberapa sayuran, ternyata bisa tumbuh subur. Siapapun yang menang Pemilu 2024, saya tetap bersyukur karena saya akan panen sayuran. (Winaryo Amanu, Janturan UH 4/46A RT 17 RW 04 Yogyakarta 55164)-f